

KEBIJAKAN ISOLASI KOREA UTARA DAN PROSPEK ANCAMAN NUKLIR DI SEMENANJUNG KOREA

Sita Hidriyah

Abstrak

Peledakan kantor penghubung antar-Korea di perbatasan oleh Korea Utara pada pertengahan Juni 2020 telah menutup komunikasi Korea Utara dan Korea Selatan. Hal tersebut juga memperlihatkan kebijakan menutup diri (isolasi) Korea Utara dari berbagai kemungkinan dialog perdamaian, yang sebelumnya diharapkan masyarakat internasional akan terus bergulir pasca-pertemuan bersejarah pemimpin kedua Korea, Kim Jong Un dan Moon Jae-in pada tahun 2018. Tulisan ini membahas secara singkat kebijakan isolasi Korea Utara tersebut, dan bagaimana prospek ancaman nuklir di Semenanjung Korea. Kebijakan isolasi Korea Utara akan membuat negara tersebut memilih untuk lebih memprioritaskan kepentingannya, termasuk program nuklirnya, sehingga potensi terjadinya konflik antara Korea Utara dengan negara-negara penentangannya di kawasan semakin terbuka, khususnya dengan Korea Selatan dan AS. Sikap Korea Utara yang menutup diri menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia, untuk kembali mendorong terjadinya dialog perdamaian di Semenanjung Korea, dan turut memastikan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea tetap terjaga.

Pendahuluan

Situasi di Semenanjung Korea menarik perhatian media akhir-akhir ini, bukan karena pemberitaan terkait harapan akan terciptanya perdamaian sebagaimana pernah mengemuka pasca-pertemuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pada 2018 lalu, tetapi sebaliknya, karena Korea Utara

yang kembali menutup diri terhadap Korea Selatan dan dikhawatirkan akan kembali memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Ketegangan di Semenanjung Korea sesungguhnya sudah terlihat ketika pada pertengahan Juni 2020 pihak Korea Utara, yang marah atas aksi pengiriman selebaran propaganda anti-Korea Utara di perbatasan, meledakkan kantor penghubung



antar-Korea yang didirikan di kota perbatasan Kaesong (cnbcindonesia.com., 16 Juni 2020).

Aksi peledakan kantor penghubung antar-Korea di wilayah perbatasan oleh Korea Utara telah menutup komunikasi Korea Utara dan Korea Selatan. Hal tersebut secara tidak langsung juga memperlihatkan kebijakan menutup diri (isolasi) Korea Utara dari berbagai kemungkinan dialog perdamaian yang sebelumnya diharapkan masyarakat internasional akan terus bergulir pascapertemuan bersejarah pemimpin kedua Korea (Kim Jong Un dan Moon Jae-in) pada tahun 2018. Kebijakan isolasi Korea Utara ini memunculkan kekhawatiran lain, yaitu ancaman nuklir kembali mengemuka di Semenanjung Korea yang berada di kawasan Asia Timur, dan berpotensi mengancam kawasan lain, termasuk Asia Tenggara (cnbcindonesia.com., 18 Juni 2020).

Tulisan ini membahas secara singkat kebijakan isolasi Korea Utara tersebut dan bagaimana prospek ancaman nuklir di Semenanjung Korea. Sebelumnya, dibahas terlebih dahulu secara singkat isu nuklir dan persenjataan peluru kendali (rudal) Korea Utara sebagai salah satu isu yang tidak bisa diabaikan ketika membicarakan situasi keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Program Senjata Nuklir Korea Utara

Melihat sejenak ke belakang, program pengembangan nuklir Korea Utara dipengaruhi dan didominasi oleh pemikiran pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, yang meyakini bahwa tindakan negaranya ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi

yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur. Kim Jong-il, putra sulung Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara berikutnya juga memiliki keinginan besar untuk mengembangkan program nuklir (Kompas.com., 12 Juni 2018).

Berkuasanya Kim Jong Un pada awal 2012, setelah ayahnya (Kim Jong-il) meninggal pada 2011, tidak membuat Korea Utara surut mengembangkan program nuklir, bahkan semakin memanas situasi keamanan di Semenanjung Korea. Secara politis, nuklir (khususnya senjata nuklir) menjadikan Korea Utara memiliki daya tawar dalam menghadapi komunitas internasional, selain sebagai alat untuk mempertahankan rezim yang dapat memperluas dukungan domestik dan penangkal potensial dalam menghadapi ancaman dari luar, khususnya dari Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan. Namun demikian, pada saat bersamaan nuklir Korea Utara, termasuk persenjataan rudalnya, telah menimbulkan keprihatinan internasional.

Keprihatinan internasional atas program nuklir dan rudal Korea Utara kembali muncul akhir-akhir ini, terutama setelah Korea Utara pada bulan Maret 2020, di tengah kekhawatiran wabah virus corona (Covid-19), menembakkan tiga rudalnya ke laut. Lembaga *think tank* AS, *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), menjelaskan bahwa berdasarkan citra satelit yang dianalisis, Korea Utara kini tengah membangun fasilitas yang cukup besar untuk menyimpan rudal balistik. Fasilitas yang dibangun di dekat Bandara Internasional Pyongyang itu

sudah hampir selesai dan bisa dipastikan berhubungan dengan program pengembangan rudal balistik antarbenua Korea Utara, Hwasong-15 (kompas.com., 7 Mei 2020).

Para analis menilai uji coba dan pengembangan rudal ini menunjukkan bahwa Korea Utara terus memperbaiki kemampuan persenjataannya selama pembicaraan nuklir dengan AS terhenti (Kompas, 26 Juni 2020). Tidak ada perkembangan signifikan setelah Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu tiga kali. Kini pembicaraan denuklirisasi di Semenanjung Korea terhenti seiring agenda pemilihan presiden AS. Perkembangan ini sudah tentu menimbulkan kekhawatiran, karena ancaman nuklir masih membayangi Semenanjung Korea, terlebih rezim di Korea Utara saat ini kembali mengambil kebijakan isolasi dan menarik diri dari perundingan denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Penarikan Diri Korea Utara dari Perundingan

Kebijakan isolasi Korea Utara dalam bentuk penarikan diri dari perundingan terkait denuklirisasi dan proses perdamaian di Semenanjung Korea memang cukup mengejutkan jika dikaitkan dengan proses interaksi antar-ke dua Korea dalam satu tahun terakhir yang dinilai cukup positif, terutama dengan terselenggaranya pertemuan dua pemimpin mereka (Kim Jong Un dan Moon Jae-in) pada tahun 2018. Namun, jika memperhatikan ke belakang, termasuk karakter pemimpin Korea Utara, Kim

Jong Un, yang sulit diprediksi, langkah yang diambil Korea Utara tampaknya bisa dipahami. Bukan sekali ini Korea Utara mengambil sikap seperti itu. Korea Utara mungkin saja sengaja menciptakan krisis untuk menggunakan ketegangan sebagai pengaruh dalam pembicaraan dengan Korea Selatan dan AS.

Korea Utara telah menggunakan cara serupa pada 2013 untuk mencoba memenangkan lebih banyak keuntungan pada perjanjian dengan Korea Selatan. Namun, dalam konteks saat ini, mungkin saja situasi ini sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian di dalam negeri. Ini dikarenakan Kim Jong Un dinilai gagal dalam memberikan kemakmuran ekonomi yang terus dijanjikannya, ditambah dengan kabar yang terus beredar bahwa Covid-19 telah memengaruhi bagian-bagian negara itu (*wartaekonomi.co.id.*, 6 April 2020). Meski pihak Korea Utara mengklaim tidak mendeteksi adanya kasus Covid-19 di negaranya, namun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa mereka telah menguji 922 orang untuk virus tersebut, bahkan PMI Internasional (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies/IFRC*) telah mengirim paket bantuan berupa alat kesehatan ke Korea Utara (*republika.co.id.*, 13 Juli 2020).

Situasi pandemi Covid-19, meski tidak diungkap secara terbuka oleh Korea Utara, bisa saja turut melatarbelakangi kebijakan isolasi Korea Utara. Namun, jika dikaitkan dengan kepentingan Korea Utara yang ingin tampil lebih unggul dan kuat secara militer dibanding Korea Selatan, ditambah dengan

pemimpinnya yang otoriter, penarikan diri Korea Utara dari perundingan bisa dimaknai sebagai upaya posisi tawar (*bargaining position*) dan bagian dari strategi politik Korea Utara untuk bisa tetap eksis sebagai negara kuat di Semenanjung Korea. Eksistensi Korea Utara yang kuat tidak dapat dilepaskan dari pemikiran pendiri Korea Utara (Kim Il-sung), sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang antara lain meyakini bahwa dibutuhkan teknologi jangka panjang, termasuk melalui program nuklir, untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur.

Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, pendekatan Korea Utara yang keras dalam membangun komunikasi dengan Korea Selatan dan AS, seakan menegaskan bahwa dalam hal perundingan, Korea Utara tidak akan melepaskan pencapaian-pencapaian negaranya, termasuk dalam hal penguasaan teknologi nuklir. Oleh karena itu sangat mungkin Korea Utara secara sepihak mengundurkan diri dari perundingan jika hal tersebut akan merugikan dan mengancam kepentingannya, terutama terkait dengan program nuklirnya. Penarikan diri Korea Utara dari perundingan dan kembali mengisolasi diri memunculkan kekhawatiran negara-negara di kawasan, karena keberadaan nuklir Korea Utara, jika tidak terkendali, dapat mengancam keamanan kawasan mereka (Asia Timur dan Asia Tenggara).

Konsekuensi dan Prospek Perdamaian

Kebijakan Korea Utara untuk mengisolasi diri akan membuat negara tersebut memilih untuk lebih

memprioritaskan kepentingannya, bahkan mungkin mengabaikan kekhawatiran negara-negara lain di kawasan akan isu nuklir Korea Utara. Jika sudah demikian, konsekuensi yang akan muncul dari kebijakan isolasi Korea Utara adalah potensi bagi terjadinya konflik antara Korea Utara dengan negara-negara penentangannya di kawasan Semenanjung Korea akan semakin terbuka, khususnya dengan Korea Selatan dan AS. Situasi seperti itu sudah terlihat belakangan ini, ketika para pejabat tinggi Korea Utara, termasuk Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim Jong Un, menyikapi aktivitas anti-Korea Utara di Korea Selatan dengan menetapkan bahwa kerja sama dengan Korea Selatan harus sepenuhnya berubah menjadi pekerjaan melawan musuh (japantimes.co., 16 Juni 2020).

Kebijakan isolasi yang diambil Korea Utara, dengan demikian, bisa memicu ketegangan, bahkan berpotensi memunculkan konflik, ketika Korea Utara tidak bersedia lagi membangun komunikasi dan dialog terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea. Prospek perdamaian di Semenanjung Korea pun semakin dipertanyakan, karena di dalamnya juga terdapat persetujuan antara Korea Utara dan AS, khususnya terkait isu nuklir.

Korea Utara yang mendapatkan sanksi PBB karena program dan kepemilikan senjata nuklirnya, menggambarkan jika sanksi PBB tersebut merupakan pelanggaran keras terhadap kedaulatan Korea Utara, dan hal tersebut oleh Korea Utara diartikan sebagai sebuah tindakan perang yang akan menghancurkan perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea. Pandangan

Korea Utara terkait sanksi PBB tersebut secara tidak langsung, juga merefleksikan kebijakan isolasi Korea Utara yang tidak mau disalahkan, termasuk dalam hal program nuklirnya. Kebijakan isolasi yang dibangun Korea Utara ini, jika terus berlangsung, akan menghambat proses perdamaian di Semenanjung Korea dan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Langkah isolasi diri kembali Korea Utara yang rawan menciptakan situasi anarki internasional baru di Asia Pasifik, sangat rawan direspons secara keliru oleh negara-negara besar yang terancam, sehingga rawan pula menciptakan ancaman konflik militer terbuka.

Konflik terbuka dalam bentuk perang antarnegara sebaiknya tidak menjadi pilihan dalam menyikapi kebikakan isolasi Korea Utara, mengingat implikasinya yang luas bagi stabilitas keamanan di kawasan, termasuk Asia Tenggara. Oleh karena itu, perundingan, dialog, dan pendekatan diplomasi harus tetap diupayakan. Masyarakat internasional, khususnya negara-negara di kawasan yang berkepentingan dengan terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk ASEAN, harus mendorong kembali terjadinya dialog, khususnya Korea Utara dengan Korea Selatan dan AS. ASEAN, melalui forum *ASEAN Regional Forum* (ARF) di mana Korea Utara juga menjadi mitra dialog, harus turut berperan dalam mendorong terjadinya kembali dialog perdamaian di Semenanjung Korea. Indonesia, yang memiliki hubungan baik dan hubungan diplomatik dengan Korea Utara, sudah tentu juga perlu mengambil peran dalam proses perdamaian tersebut.

Penutup

Sikap Korea Utara yang menutup diri menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan untuk kembali mendorong terjadinya dialog perdamaian di Semenanjung Korea. Negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia di dalamnya, harus mengambil peran untuk mengupayakan kembali proses dialog tersebut, dan turut memastikan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea tetap terjaga. Ancaman nuklir yang datang dari Korea Utara tidak boleh mengendurkan masyarakat internasional untuk mengajak Korea Utara berdialog dan kembali ke meja perundingan demi terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea menjadi kepentingan bersama negara-negara di kawasan, tidak saja Asia Timur, tetapi juga Asia Tenggara.

Referensi

- “Korea Utara-Selatan: Perang, Baik, Putus Hubungan”, *cncindonesia.com*. 18 Juni 2020, <https://www.cncindonesia.com/news/20200618153441-4-166325/korea-utara-selatan-perang-baik-putus-hubungan>, diakses 9 Juli 2020.
- “Korut ke AS: Hanya Nuklir yang Bisa Mengalahkan Nuklir”, *Kompas*, 26 Juni 2020, hal. 6.
- “Korea Utara Bangun Fasilitas untuk Simpan Rudal Balistik”, *kompas.com*, 7 Mei 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/07/201831770/korea-utara-bangun-fasilitas-untuk-simpan-rudal>

balistik?page=all, diakses 14 Juli 2020.

"Kim Jong Un's sister takes bigger role in threats to South Korea", *japantimes.co.*, 16 Juni 2020, <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/16/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/north-korea-kim-jong-un-sister-kim-yo-jong-bigger-role-south-korea>, diakses 14 Juli 2020.

"Melihat Kembali Perjalanan Program Senjata Nuklir Korea Utara," *kompas.com.*, 12 Juni 2018, <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/12/10520171/melihat-kembali-perjalanan-program-senjata-nuklir-korea-utara?page=all>, diakses 14 Juli 2020.

"PMI Internasional Kirim Paket Bantuan Covid-19 ke Korut", *republika.co.id.*, 13 Juli 2020, <https://republika.co.id/berita/qdecew382/pmi-internasional-kirim-paket-bantuan-covid19-ke-korut>, diakses 14 Juli 2020.

"Perang! Korut Ledakan Kantor Penghubung Korsel", *cnbcindonesia.com.*, 16 Juni 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200616145026-4-165763/perang-korut-ledakan-kantor-penghubung-korsel>, diakses 14 Juli 2020.



Sita Hidriyah
sita.hidriyahg@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.